

**BASELANG**

Jurnal Ilmu Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Lingkungan  
e-journal.faperta.universitasmuarabungo.ac.id

**Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia**  
(Artikel Review)

*Sustainable Agricultural Development In Indonesia*  
(Article Review)

**Fikriman, Eci Prayetni, Pitriani**

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo

**Article Info**

*Keywords : Development, Agricultural, Sustainable*

Email:

fikrimanlukman@gmail.com,  
eciprayetni@gmail.com,  
pitrianianto@yahoo.com

Program Studi Agribisnis, Fakultas  
Pertanian, Universitas Muara  
Bungo, Jl. Pendidikan, Rt.10 Rw.02  
No.10 Kelurahan Sungai Binjai.  
Kecamatan Bathin III. Kabupaten  
Bungo, Jambi 37288, Indonesia

**ABSTRAK**

Pengertian pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Maksud dari Pertanian berkelanjutan yang sebenarnya adalah yang berkelanjutan secara ekonomi yang dicapai dengan: penggunaan energi yang lebih sedikit, minimalnya jejak ekologi, lebih sedikit barang berkemasan, pembelian lokal yang meluas dengan rantai pasokan pangan singkat, lebih sedikit bahan pangan terproses, kebun komunitas dan kebun rumah yang lebih banyak, dan lain sebagainya.

Pertanian berkelanjutan amat bergantung pada pengembalian nutrisi ke tanah dengan meminimalisasi penggunaan sumber daya alam non-terbarukan seperti gas alam (yang digunakan sebagai bahan baku pupuk) dan mineral (seperti fosfat). Faktor yang paling penting dalam pendayagunaan sumber daya alam di suatu lahan adalah tanah, cahaya matahari, udara, dan air.

Pertanian berkelanjutan (Sustainable Agriculture) merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pada sektor pertanian. Konsep pertanian berkelanjutan, ialah yang bertumpu pada tiga pilar: ekonomi, sosial, dan ekologi.

Kata kunci: pembangunan, pertanian, berkelanjutan

**ABSTRACT**

*The definition of sustainable agriculture is the successful management of resources for agricultural enterprises to meet changing human needs while maintaining or improving environmental quality and conserving natural resources. The true meaning of sustainable agriculture is one that is economically sustainable which is achieved by: less energy use, minimal ecological footprint, less packaged*

*goods, widespread local purchasing with shorter food supply chains, less processed foodstuffs, community gardens and gardens more houses, and so on.*

*Sustainable agriculture relies heavily on returning nutrients to the soil by minimizing the use of non-renewable natural resources such as natural gas (which is used as a feedstock for fertilizers) and minerals (such as phosphates). The most important factors in the utilization of natural resources in a land are soil, sunlight, air, and water.*

*Sustainable agriculture is the implementation of the concept of sustainable development in the agricultural sector. The concept of sustainable agriculture is based on three pillars: economic, social, and ecological.*

*Keywords: development, agricultural, sustainable*

## PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian berperan strategis dalam pembentukan sistem perekonomian nasional, peran strategis tersebut ditunjukkan melalui berbagai aspek seperti, pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Kelestarian sumberdaya lahan pertanian dan mutu lingkungan serta keberlanjutan sistem produksi merupakan hal yang kritical bagi usaha pertanian di negara tropis termasuk Indonesia, paradigma pembangunan pertanian ini, bertumpu pada kemampuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan kemampuan sendiri, dan memperhatikan potensi kelestarian lingkungannya.

Tuntutan untuk menerapkan pertanian berkelanjutan di Indonesia menjadi isu penting dalam pembangunan pertanian. Banyak pihak mendorong agar sistem pertanian berkelanjutan dapat diterapkan secara luas dan mampu membentuk iklim pertanian yang lebih sehat demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi para petani di Indonesia, pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi dan kelembagaan untuk menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Pembangunan pertanian harus mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman dan hewan, tidak merusak lingkungan, tepat guna, sehingga berimplikasi pada proses pembangunan yang berwawasan lingkungan serta dapat mengurangi dampak kegiatan pembangunan pertanian yang menimbulkan pencemaran lingkungan secara luas, selain itu menghasilkan berbagai produk pertanian, baik primer maupun hasil olahan, yang berkualitas serta berdaya saing tinggi, pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai konsep pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan serat dari hewani maupun nabati dengan cara-cara yang menguntungkan secara ekonomi, adil secara sosial dan ramah terhadap lingkungan.

Metode Penelitian Setidaknya ada tiga hal yang menuntut pembangunan pertanian

dan mampu menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan, diantaranya adalah pertanian berkelanjutan berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pengurangan limbah industri dan eksploitasi sumberdaya alam yang dapat merusak ekosistem bumi secara menyeluruh, kemudian membaiknya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan semakin sadar mengenai kualitas hidup yang lebih baik didukung kualitas lingkungan yang sehat dan bersih dan yang terakhir masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan sehingga sangat memperhatikan kualitas produk makanan dan minuman yang dikonsumsi baik dari segi proses produksi maupun mutu kandungan gizi, Pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai usaha pertanian yang memanfaatkan dan sekaligus melestarikan sumberdaya secara optimal guna menghasilkan produk panen secara optimal, menggunakan masukan sarana dan biaya yang wajar, mampu memenuhi kriteria sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta menggunakan sarana produksi yang terbarukan dan produktivitas sumber daya sepanjang masa (Dadi. 2021).

Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat strategis, disamping sebagai sumber penghasil devisa yang besar, sektor pertanian juga merupakan sumber ekonomi bagi sebagian besar penduduk Indonesia, dan merupakan sektor yang paling banyak dalam penyerapan tenaga kerja. Pada umumnya sebagian besar adalah tenaga kerja tidak terdidik, tidak memiliki ketrampilan dan pendapatan yang tidak merata. Atas kondisi inilah yang menyebabkan bargaining power yang dimiliki oleh para petani kita sangat lemah, sehingga nilai jual dari produk juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ini.

Kebijakan pembangunan bidang pertanian khususnya dalam penyelenggaraan pangan nasional telah diejawantahkan dalam Undang-Undang No 18 tahun 2012. Secara umum undang-undang ini sudah mengatur pembagian peran masing-masing tingkat pemerintahan dalam pembangunan ketahanan pangan nasional sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan pembagian wewenang dalam mengeksekusi pengaturan kebijakan pembangunan pertanian.

pangan merupakan isu sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perkara ketahanan pangan seharusnya dijadikan prioritas. Salah satu yang menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia saat ini adalah terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan yang meningkat cepat tersebut merupakan resultante dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat dan perubahan selera. Lebih lanjut menurut (Wicaksono. 2012) bahwa seorang pemimpin setidaknya dia mampu melaksanakan political mapping untuk internal dan eksternal organisasi kemudian dilakukan analisis dengan parameter visi, misi, rencana strategis dan desain kebijakan makro. Hal tersebut dimaksudkan agar seorang pemimpin dapat secara cermat mengetahui apa yang menjadi hambatan dan peluang, sehingga dapat mempermudah dalam perencanaan aksi yang lebih detail. Karena pada dasarnya pemimpin tersebut yang mempunyai andil besar dalam pengambilan kebijakan. Konstitusi dalam UU Pemerintahan Daerah (Pemda) merupakan jaminan adanya sistem otonomi daerah. Akan tetapi, esensi dari otonomi daerah idealnya tidak melampaui batas sehingga dimaknai sebagai pemberian kedaulatan/hak mutlak oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat dan menghasilkan kebijakan dan keputusan menurut tujuan, sasaran, dan kepentingan aktor-aktor politik di daerah.

Maka, demi kepentingan publik yang lebih besar, hendaknya para pemimpin dan para pengampu kebijakan di daerah sudah saatnya menanggalkan ego pribadi, ego kelompok serta egosentris kedaerahan untuk kebermanfaatannya yang lebih besar guna mewujudkan integrasi kebijakan penyelenggaraan pangan agar dapat saling sinergi dan tidak saling tumpang tindih. Perumusan kebijakan ketahanan pangan di Indonesia telah di amanatkan dalam UU tentang pangan pada tahun 1996, dan dikuatkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2001. Puncaknya, pada pertemuan Pangan dunia tahun 2002 (WorldFood Summit- five years later : WFS -

fyl). Pertemuan tersebut melatarbelakangi lahirnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 132 tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang bertugas diantaranya untuk merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan nasional yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan; dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional (Arifa. 2017).

Pertanian organik dapat digunakan sebagai solusi pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan (Sustainable agriculture) adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources) untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negative terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi: penggunaan sumberdaya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan. Pada saat pandemi Covid 19 Ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang penting karena dapat mengakibatkan berbagai permasalahan di antaranya terganggunya produksi, distribusi, dan konsumsi kebutuhan pokok akibat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar dan larangan perjalanan bagi masyarakat. Kondisi ini dapat memicu Pertanian Organik Sebagai Solusi Pertanian Berkelanjutan di Era New Normal

Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 331 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

kekhawatiran jika Indonesia akan mengalami krisis pangan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyampaikan akan adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi Covid 19(Rachma dan Umam, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif serta kajian pustaka yang dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat penjelasan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari berbagai sumber diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) (Arifa, 2017).

Penelitian ini merupakan penelitian survai. Teknik survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner penelitian sebagai alat pengumpul data. Tipe penelitian yang digunakan adalah explanatory research yaitu penelitian yang sifat analisisnya menghubungkan antara variabel melalui uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan paduan metode kuantitatif dan juga kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik survei dengan menggunakan instrumen kuesioner terstruktur, yang memuat sejumlah pertanyaan terkait dengan variabel penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, metode kualitatif dilakukan dengan observasi lapang dengan menggunakan panduan pertanyaan wawancara mendalam. Tujuan dari menggunakan metode kualitatif adalah untuk dapat lebih memahami permasalahan di lokasi penelitian secara lebih mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi Jurnal Penyuluhan, Maret 2015 Vol. 11 No. 127 literatur penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Ningsih dan Sjaf. 2015).

Pada tahapan identifikasi permasalahan di lapangan menggunakan metode wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mendeteksi permasalahan sosial yang diamati kemudian mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dengan melakukan survey awal (Rachma dan Umam. 2020).

Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan data primer berupa peta citra drone, data existing penggunaan lahan desa, serta jenis komoditi yang dikembangkan oleh masyarakat desa. Data sekunder yang digunakan berupa data potensi desa dan data sosial ekonomi masyarakat desa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dokumen Profil Desa (Arham. Dkk, 2019).

## **HASIL PENELITIAN**

Kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah dapat mempengaruhi cepat lambatnya pembangunan pertanian serta akses masyarakat kepada pangan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi edukasi berupa pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang pertanian.

Pembangunan pertanian berdimensi luas dan melibatkan seluruh aspek dan sektor pembangunan lainnya, keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan tidak hanya oleh performa sektor pertanian semata, namun juga oleh sektor lainnya yang menunjang kegiatan pertanian. Penerapan kebijakan otonomi daerah sejatinya merupakan kesempatan besar bagi para kepala daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan dengan potensi lokal yang dimilikinya. Kepala daerah mempunyai kewenangan yang sangat longgar dalam membuat kebijakan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan tentunya membutuhkan langkah strategis dalam perumusan pembuatan kebijakan (Arifa, 2017).

Persepsi pemuda terhadap pembangunan pertanian lahan pangan berkelanjutan positif, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara langsung dengan pemuda yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Persepsi pemuda terhadap pembangunan pertanian lahan pangan berkelanjutan meliputi aspek nilai ekonomi, kondisi lingkungan, perhatian pemerintah, peran pemuda dalam pertanian dan prestise (Ritonga. Dkk, 2015).

Di sisi lain sistem pertanian berkelanjutan juga diuntut untuk menghasilkan pemenuhan kebutuhan dan pendapatan secara mandiri, (Fikriman. Dkk, 2020) berpendapat bahwa pendapatan keluarga mempengaruhi kegiatan pertanian dan secara keberlanjutan ekonomis ini bisa diukur bukan hanya dalam hal produk usahatani secara langsung, namun dalam fungsi melestarikan sumberdaya alam secara menyeluruh, kemudian sumberdaya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar semua anggota masyarakat dan hak-hak mereka dalam penggunaan lahan terpenuhi, disertai dengan bantuan teknis serta peluang pemasaran yang terjamin secara luas, namun yang paling penting dalam sistem pertanian keberlanjutan ini adalah para petani mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usahatani yang berlangsung terus menerus misalnya penambahan jumlah penduduk, kebijakan pemerintah, dan permintaan pasar yang beragam.

Adapun ciri-ciri yang terdapat pada sistem pembangunan pertanian berkelanjutan adalah, memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan eko sistem yang mendukungnya, memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi pengelolaannya, mampu menghasilkan produk secara lestari, memberi kesempatan kepada sektor lain untuk berkembang secara berkesinambungan, selanjutnya menggunakan prosedur dan tatacara yang memperhatikan kelestarian fungsi alam dan ekosistem yang jauh lebih seimbang Dengan kata lain, konsep pertanian berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi yaitu, usaha ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial manusia dan keberlanjutan ekologi alam, serta terdapat lima kriteria untuk mengelola suatu sistem pertanian menjadi sistem berkelanjutan yaitu kelayakan ekonomi, bernuansa dan bersahabat dengan ekologi diterima secara sosial, kepuasan secara budaya dan yang terakhir pendekatan sistem dan holistik (Dadi, 2021).

Untuk memastikan suatu kondisi ekonomi apakah akan berjalan baik ataukah tidak, dalam jangka panjang, perlu kepastian pula dalam kebijakan dengan sinyal dan arah yang jelas pula. Bahkan, sangat diperlukan

kebijakan induk, yang memandu seluruh dinamika kebijakan departemen dan daerah.

Pembangunan pertanian berdimensi luas dan melibatkan seluruh aspek dan sektor pembangunan lainnya, keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan tidak hanya oleh performa sektor pertanian semata, namun juga oleh sektor lainnya yang menunjang kegiatan pertanian. Penerapan kebijakan otonomi daerah sejatinya merupakan kesempatan besar bagi para kepala daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan dengan potensi lokal yang dimilikinya. Kepala daerah mempunyai kewenangan yang sangat longgar dalam membuat kebijakan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan tentunya membutuhkan langkah strategis dalam perumusan pembuatan kebijakan (Arifa, N.S.A, 2017).

## KESIMPULAN

Pertanian berkelanjutan merupakan sebuah metode usaha tani yang bertumpu pada pemberdayaan para petani secara global, selain itu melalui pertanian berkelanjutan juga masyarakat di harapkan dapat melindungi berbagai sumberdaya alam yang tersedia seperti tanah, air dan lingkungan, di sisi lain sistem pertanian berkelanjutan harus memenuhi tiga prinsip dasar, sebagai acuan terbentuknya sistem pertanian yang ideal serta dapat menunjang berbagai aspek kehidupan bagi masyarakat secara luas, di antaranya adalah, keberlanjutan ekonomi, pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan kelayakan ekonomi melalui banyak cara.

Penerapan otonomi daerah dan otoritas kepemimpinan kepala daerah memberi dampak terhadap perubahan kebijakan sektor pertanian. Penerapan otonomi daerah mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang menjadi kelebihan antara lain, (1) menjadi motivasi dan inspirasi bagi setiap pemimpin daerah untuk berinovasi dalam mensejahterahkan rakyat. (2) Pemberlakuan otonomi daerah memberikan keleluasaan ruang gerak (kewenangan) pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program yang sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki Kelemahan

dimungkinkan sering terjadi pergantian kebijakan ketika terjadi perpindahan tampuk kepemimpinan dan adanya disharmoni kebijakan dan program akibat ego politik dan perbedaan gaya kepemimpinan.

Penggunaan teknologi drone sangat membantu dalam memberikan citra wilayah desa objek penelitian. Penangkapan citra wilayah desa menggunakan drone dapat menjadi alternatif bagi pemerintah desa demi memenuhi kebutuhan informasi spasial desa. Pada penelitian ini, citra drone digunakan menjadi acuan utama pada berbagai Analisa yang dilakukan peneliti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arham, I Dkk, (2019), *Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus Desa Sukadamai Kabupaten Bogor)*, (*Jurnal Ilmu Lingkungan*), 17 (2).
- Arifa, N.S.A, (2017), *Harmonisasi Kepemimpinan Di Kabupaten Wonosobo Dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*, (*Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*), 6 (2).
- Dadi, D, (2021), *Pembangunan Pertanian Dan Organik: Bagaimana Proses Serta Strategi Deni Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia*, (*Jurnal Education and development*), 9 (3).
- Fikrman, F., Budiman, F. A., & Afrianto, E. (2020). Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 4(2), 149-161.
- Ningsih, F dan Sjaf, S, (2015), *Faktor-Faktor yang Menentukan Keterlibatan Pemuda Pedesaan pada Kegiatan Pertanian Berkelanjutan*, (*Jurnal Penyuluhan*), 11 (1).
- Rachma, N dan Umam, A.S, (2020), *Pertanian Organik Sebagai Solusi Pertanian Berkelanjutan Di Era New Normal*, (*Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*), 1 (4).
- Ritonga, A dkk, (2015), *Analisis Peran Pemuda Terhadap Pembangunan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan*

*Di Kabupaten Labuhan Batu Utara, ( Jurnal Pertanian Tropik), 2 (3).*